



**DOKUMEN KINERJA
(LKJ)**

**BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2024**

BKD

TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. RAYA PADANG PANJANG NO.1. TELP. (0739)23148 FAX (0739)23148 MANNA
Email : badankeuangandaerah.bengsel@gmail.com / Website : www.Bpkad.bengkuluselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 07 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD perlu disusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk menjamin penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, perlu dibentuk tim penyusunan laporan kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Tim Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 55),

- Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotrapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

- Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan laporan kinerja sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab bertugas memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah penyusunan laporan kinerja.
 - b. Ketua Tim bertugas untuk menyusun rencana kerja, mengoordinasikan, dan melaksanakan tugas dengan anggota tim, serta melaporkan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu perkembangan pelaksanaan tugas kepada Penanggungjawab.
 - c. Sekretaris Tim bertugas untuk melaksanakan tugas administrasi, membantu menyiapkan kebutuhan tim, menyusun dan menyampaikan laporan kepada Ketua Tim.
 - d. Koordinator Kelompok Kerja bertugas mengoordinasikan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi, referensi dan menyusun narasi laporan kinerja sesuai dengan bidangnya, serta melaporkan secara berkala dan/atau

sewaktu-waktu perkembangan pelaksanaan tugas kepada Penanggungjawab melalui Ketua Tim.
e. Anggota bertugas melaksanakan tugas sesuai dengan rencana kerja dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Koordinator Kelompok Kerja.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim memiliki hak dan kewenangan meminta data, informasi dan/atau referensi yang dibutuhkan ke unit kerja lain dalam satu perangkat daerah maupun lintas perangkat daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dapat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 06 Januari 2025

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan



NUZMANTO M.ADIL, ST
PEMBINA TK.I
NIP. 19751106 200312 1 006

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA
 BADAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN.BENGGULU SELATAN
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
 DI LINGKUNGAN BADAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	NUZMANTO M. ADIL,ST	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2.	AWAL EFLIE, SP	Sekretaris Dinas	Ketua Tim
3.	DESMI HARYANI, A.Md	Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda	Sekretaris Tim
4.	DELLA ARIESTANTIA, S.Kom	PHL (Operator Komputer)	Anggota
5.	SYAIFUL BAKTIAR, SE.M.Si	Kabid Perbendaharaan Daerah	Koordinator Bidang I
6.	LAKSMI MALANTIKA, ST	Kasubid Pengelolaan Kas Daerah	Anggota
7.	ARIO SATRIA, SS	Kasubid Pembiayaan	Anggota
8.	TEJA LESMANA EKA SAPUTRA, SE	Kabid Akuntansi dan Pelaporan	Koordinator Bidang II
9.	RAHMAD HARRY DAPIN, SE	Kasubid Akuntansi dan Pelaporan Penerimaan Kas Daerah	Anggota
10.	BAHIDIN, SE, M.Si	Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	Koordinator Bidang III
11.	ARIEF PUTRA, SIP	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Anggota
12.	TIWARDI, SE	Kasubid Kebutuhan Perencanaan Aset	Anggota
13.	BUDI HENDRIYANTO, S.Sos	Kasubid Penatausahaan BMD	Anggota
14.	ARIF BUDIMAN, S.Hut.M.Ling	Kabid Perencanaan Anggaran Daerah	Koordinator Bidang IV
15.	LEDYA PERONICA, SE	Kasubid Anggaran Dinas Daerah	Anggota

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan



NUZMANTO M.ADIL, ST
NIP. 19751106 200312 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. RAYA PADANG PANJANG NO.1. TELP.(0739)23148 FAX (0739)23148 MANNA
Email : badankeuangandaerah.bengsel@gmail.com / Website : www.Bpkad.bengkuluselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR : 08 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN LAPORAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2024

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026;
 2. Bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah tahun 2021- 2026 di pandang perlu dibentuk Surat Keputusan Pengesahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
 3. Bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat** :
4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang- undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintah pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif (Pasal 13);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan 2005-2025;
11. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8);

Menetapkan :
 PERTAMA :

MEMUTUSKAN

KEDUA : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 untuk dijadikan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Keuangan Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Keuangan Daerah Tahun 2021-2026;

KETIGA : Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memuat rencana program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Keuangan dan Aset Daerah selama 5 (lima) tahun;

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah

KEEMPAT

: (OPD) Badan Keuangan Daerah yang sudah disahkan oleh Bupati ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Keuangan Daerah tentang penetapan Perubahan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Keuangan Daerah Tahun 2021-2026;

Sistematika Penulisan

Penulisan LAKIP BKD Bengkulu Selatan Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi, Isu Strategis serta Sistematika penyusunan LAKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Strategi dan Perjanjian, Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Perjanjian Kinerja, Rencana Anggaran Badan Keuangan Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan tentang Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

BAB IV PENUTUP

Mengemukakan tinjauan secara umum dengan menjelaskan keberhasilan atau kegagalan, Solusi dan Hambatan yang berkaitan dengan kinerja Badan Keuangan Daerah serta strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya.

Ditetapkan di : Manna
Pada Tanggal :

2025


**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**
NUZMANTO M. ADIL, ST
NIP. 19751106 200312 1 006

DAFTAR ISI -----	i
KATA PENGANTAR -----	ii
IKHITISAR EKSEKUTIF -----	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A . Latar Belakang-----	5
B. Dasar Hukum -----	5
C . Tugas, Fungsi dan Struktur -----	7
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Perencanaan Strategi-----	37
B. Visi dan Misi-----	41
C. Tujuan Sasaran -----	42
D. Strategi dan Kebijakan-----	42
E. Penetapan Kinerja -----	44
F. Rencana Anggaran -----	56
G. Alokasi Anggaran-----	61
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Metode Pengukuran Kinerja-----	64
B. Capaian Kinerja dan Analisis Kinerja-----	64
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Utama-----	67
D. Realisasi Anggaran -----	82
E. Inovasi Perangkat Daerah -----	90
F. Aktualisasi dan Implementasi Core Values BerAKHLAK -----	92
BAB IV PENUTUP -----	94
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 merupakan perwujudan kewajiban Instansi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk memprtanggung jwabkan terhadap keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Laporan Kinerja (LKj) Badan Keuangan Daerah Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2024 adalah merupakan Laporan Pertanggung Jawaban yang disampaikan secara melembaga yang merupakan akumulasi dari keseluruhan pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi pengelolaan sumber daya dari pelaksanaan yang dipercayakan kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan perencanaan startegis yang telah dirumuskan sebelumnya.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja yang disusun ini masih jauh dari apa dikatakan sempurna, oleh karena itu kritik serta saran yang sifatnya membangun sangatlah diharapkan untuk diprebaiki selanjutnya.

Sekian terima kasih.

Manna, 24 Januari 2024

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan



Nuzmanto M. Adil, ST
NIP. 197511062003121006

IKHITISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah (LKj) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021-2026. Laporan Kinerja (LKj) juga sebagai alat kendali dan alat penilaian kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BKD menuju terwujudnya good governance yang didasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan didalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis Tahun 2024 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Untuk mencapai visi dan misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten menetapkan 1 (Satu) Sasaran Strategi dan 1 (Satu) Indikator Kinerja. Untuk mendukung sasaran dan Indikator kinerja kepala Badan Keuangan Daerah, indikator Kinerja tersebut merupakan ikhtisar hasil (Outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas, pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai lebih terukur tingkat kemanfaatannya. Tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kerja masing-masing sasaran strategi tersebut dapat diilustrasikan dalam table berikut:

No	Sasaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Terlaksananya tugas dan pelayanan kinerja yang prima	6 Orang Petugas	6 Orang Petugas	100%
2	Tersedianya inventaris aset daerah yang handal dan akurat Tercapainya LKPD dengan opini WTP	40 SKPD WTP	40 SKPD Pada saat pembuatan laporan LKJ laporan ni hasil laporannya blm keluar apa WDP atau WTP	100%
3	Tersedianya Data keuangan yang berat dan akurat	40 SKPD	40 SKPD	100%

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2024 ini memberikan gambaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam tahun anggaran 2024 dikaitkan dengan Rencana Kinerja kerja tahun 2024 serta rencana strategis Badan Keuangan Daerah Kabupten Bengkulu Selatan, serta sebagai bahan evaluasi bagi Pegawai Badan Keuangan Daerah di masa-masa yang akan datang untuk mencapai pelayanan terbaik pada masyarakat.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 adalah:

1. Mewujudkan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan.
2. Mengevaluasi kinerja kegiatan untuk menentukan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Badan Keuangan Daerah selama tahun anggaran 2024.
3. Mengevaluasi keberhasilan/kegagalan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun anggaran 2024.
4. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja pada Badan Keuangan Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Bengkulu Selatan Di Provinsi Bengkulu.

2. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotrapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pejabaran APBD Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Nomor 32).

1.4 Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah

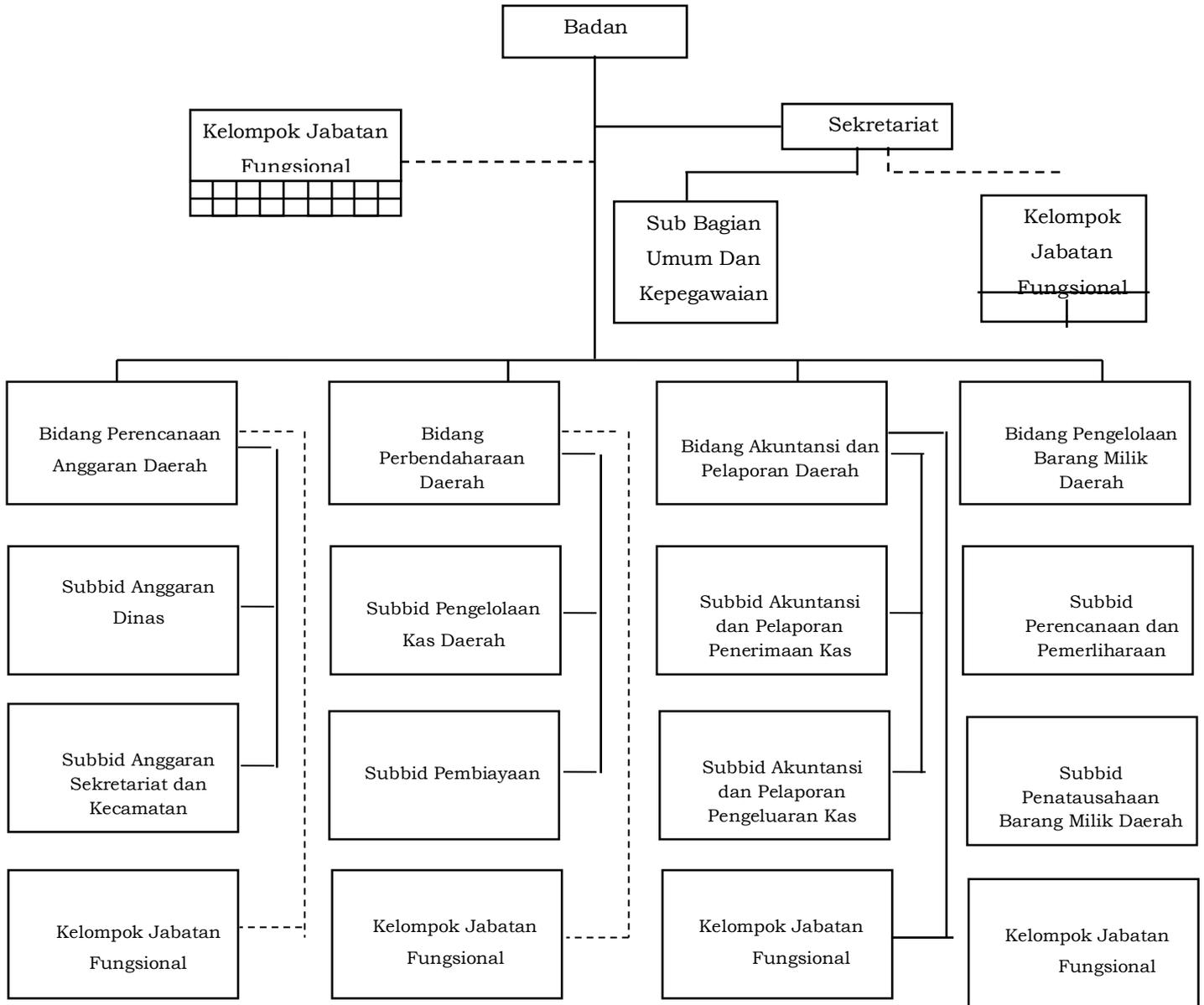
A. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Badan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari :

1. Unit pimpinan yaitu ; Kepala Badan;
2. Unsur Sekretariat yaitu; sekretaris membawahi 3 Sub Bagian Yaitu :
 - a. Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - b. Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Kasubag Keuangan dan Barang Milik Daerah
3. Bidang Anggaran Membawahi 3 Sub Bidang ;
 - a. Kasubid Anggaran Daerah
 - b. Kasubid anggaran Badan dan lembaga lainnya
 - c. Kasubid anggaran sekretariat dan kecamatan
4. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi membawahi 3 Sub Bidang ;
 - a. Kasubid pengelolaan kas daerah
 - b. Kasubid belanja

- c. Kasubid akuntansi dan pelaporan
- 5. Bidang pengelolaan barang milik daerah membawahi 3 Sub Bidang yaitu ;
 - a. Kasubid kebutuhan perencanaan Aset
 - b. Kasubid pemeliharaan aset
 - c. Kasubid inventarisasi dan penghapusan Aset
- 6. Kelompok jabatan Fungsional

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**



B. Isu-Isu Strategis

Dari analisa terhadap isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, dapat ditarik beberapa isu strategis yang menjadi tantangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan selama periode Rencara Strategi 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

Tabel 1.4.1

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Opini BPK terhadap LKPD	Kurang fasilitas jaringan / server SIMDA yang kurang memadai	Kualitas dan efektifitas pengelolaan data dan informasi keuangan berbasis elektronik kurang memadai
			Integrasi aplikasi sistem informasi belum maksimal
			Kualitas dan efektifitas pelayanan , pengelolaan data dan informasi keuangan dalam kerangka transparansi belum optimal
			Kapasitas sistem informasi keuangan daerah dan integrasinya belum optimal
		Minimnya dana untuk melakukan sosialisasi Bimtek	Masih kurangnya sosialisasi tentang pengelolaan keuangan daerah meliputi pengelolaan perbendaharaan, implementasi akuntansi berbasis akrual
			Kualitas pembinaan pengelolaan keuangan daerah belum optimal

		Perlu peningkatan SDM yang ada	Kompetensi, kapasitas , kualitas dan ontegritas aparatur pengelolaan keuangan masih perlu ditingkatkan
2	Inventarisasi Pengamanan dan Pemanfaatan Aset	Personel dibidang pengelolaan BMD yang kurang mampu dan tanggap untuk menyelesaikan setiap permasalahan baik itu aset tetap maupun aset lainnya (SDM yang kurang profesional)	Aset tetap dan aset lainnya dari setiap OPD untuk mengusulkan tentang pemusnahan dan penghapusan ke bidang pengelolaan BMD kurang respon/kurang tanggap
3	Penetapan perda APBD tepat waktu	Panjangnya rentang waktu diukur sebelum perencanaan dan penganggaran dapat diinput dalam proses dan tahapan penyusunan APBD, sehingga semua tahapan tidak dapat dipenuhi secara konsisten	Panjangnya rentang waktu diskkursus sebelum perencanaan dan penganggaran dapat diinput dalam proses dan tahapan penyusunan APBD, sehingga semua tahapan tidak dapat dipenuhi secara konsisten
		Perbedaan persefektif dan kepentingan melibatkan tarik-ulur pembahasan yang kompleks, dan adakalanya memunculkan defiasi	Perbedaan persefektif dan kepentingan melibatkan tarik-ulur pembahasan yang kompleks, dan adakalanya memunculkan defiasi dari alur APBD yang telah direncanakan

		dari alur APBD yang telah direncanakan	
--	--	--	--

Strategi yang dilakukan pada badan keuangan daerah kabupaten Bengkulu Selatan untuk mencapai tujuan dan sasaran supaya mendapatkan kunci keberhasilan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan dan Pentahapan pembayaran Non Tunai;
2. Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah secara terpadu;
3. Optimalisasi pengelolaan aset daerah secara terpadu;
4. Melakukan validasi data terkait aset di pengguna yang masih layak digunakan untuk mendukung tuisi yang akan dimanfaatkan dengan mempertimbangkan kondisi dan status aset melalui BMD.
5. Menerapkan asa efesiensi ,efektifitas dan akuntabilitas serta disiplin anggaran dalam menyusun rencana belanja pada program dan kegiatan
6. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah;

C. Keadaan Pegawai

a. Sumber Daya Manusia Badan Keuangan Daerah

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (*Human Resources*) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2024.

Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongan, kompetensi pegawai di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan terbanyak adalah pegawai golongan (III) yaitu sebanyak 29 orang, dari jumlah total pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 31 Orang, sedangkan golongan tertinggi golongan (IV) Sebanyak 2 orang atau 10 % dari jumlah total pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Secara lengkap komposisi pegawai Badan Keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel 1.1. berikut

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Tingkat I	IV/b	1
2	Pembina	IV/a	1
3	Penata Tingkat I	III/d	16
4	Penata	III/c	10
5	Penata Muda Tingkat I	III/b	1
6	Penata Muda	III/a	1
8	Pengatur Tingkat I	II/d	0
9	Pengatur	II/c	0
10	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	0
11	Pengatur Muda	II/a	0
JUMLAH			30

2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambaran mengenai Pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, berdasarkan tingkat Pendidikan sebagaimana tabel 1.2 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

	Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 3 (S3)	0
2.	Strata 2 (S 2)	2
3.	Strata 1 (S 1)	45
4.	Diploma 3 (D 3)	2
5.	SLTA / SMK	1
Jumlah		50

Dari tabel di atas dapat dilihat untuk klasifikasi tingkat pendidikan (S3) berjumlah 0 orang strata 2 (S2) berjumlah 2 orang . Pada tingkat pendidikan strata 50 (S1) menunjukkan jumlah pegawai yang paling dominan yaitu dengan jumlah 50 pegawai dari keseluruhan jumlah pegawai di BKD Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk klasifikasi Diploma 3 (D3) berjumlah 2 orang sedangkan untuk SLTA/SMK berjumlah 1 pegawai.

3. Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

Komposisi Pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan dapat dilihat pada tabel 1.3 sebagai Berikut ;

Tabel 1.3

Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

	Diklat Penjenjangan	Jumlah
1.	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	Orang
2.	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	Orang
3.	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	Orang
	Jumlah	Orang

Berdasarkan tabel 1.3 diatas diperoleh informasi mengenai pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tidak ada yang mengikuti pelatihan penjenjangan.

D. Keadaan Saran dan Prasarana

Sarana penunjang yang dimiliki Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai berikut :

a. Gedung Kantor

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terletak di jalan Raya Padang Panjang terdiri dari :

- 1 Ruang kerja kepala
- 3 Ruang kerja bagian sekretariat
- 3 Ruang kerja untuk tiga bidang, yaitu bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Bidang Aset. 1 Gedung Lagi untuk 1 Bidang terdiri dari Bidang Anggaran.

b. Meja/kursi

Para pejabat struktural beserta staf mempunyai meja dan kursi kerja masing-masing. Diruang kepala tersedia perangkat meja kursi untuk menerima tamu, Almari Billing abinet, 1 Unit TV dan 2 Unit Kulkas .

c. Komputer

Adapun komputer yang ada di Badan Keuangan Daerah, ada 45 buah Laptop.

d. Kendaraan

Kendaraan yang dimiliki dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan tugas adalah 2 buah mobil Rush,2 Mobil Avanza, 1 Buah Hilux ,1 Mobil Ertiga , 3 buah motor GL prodan 4 buah Motor Yamaha Mio 39 buah sepeda motor dengan berbagai macam merk.

E. Keuangan

Tabel 1.4
Sumber Data Belanja DPA 2024 BKD

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												FORMULIR PERUBAHAN DPA BELANJA SKPD							
KAB. BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024																			
Nomor DPPA : DPPA/A.3/5.02.0.00.0.00.04.00 00/001/2024																			
SKPD : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Keuangan Daerah																			
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																			
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											T 1
								Tahun					Bertambah / Berkurang)						
								Sebelum					Setelah						
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%
5.02.0.00.0.00.04.0000					Badan Keuangan Daerah			Rp24.825.226.134,00	Rp640.915.000,00	Rp2.193.092.000,00	Rp171.508.840.000,00	Rp199.168.073.134,00	Rp30.634.818.234,00	Rp1.929.308.000,00	Rp2.193.092.000,00	Rp175.001.310.000,00	Rp209.758.528.234,00	Rp10.590.455.100,00	5.05
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			Rp24.825.226.134,00	Rp640.915.000,00	Rp2.193.092.000,00	Rp171.508.840.000,00	Rp199.168.073.134,00	Rp30.634.818.234,00	Rp1.929.308.000,00	Rp2.193.092.000,00	Rp175.001.310.000,00	Rp209.758.528.234,00	Rp10.590.455.100,00	5.05
5	02				KEUANGAN			Rp24.825.226.134,00	Rp640.915.000,00	Rp2.193.092.000,00	Rp171.508.840.000,00	Rp199.168.073.134,00	Rp30.634.818.234,00	Rp1.929.308.000,00	Rp2.193.092.000,00	Rp175.001.310.000,00	Rp209.758.528.234,00	Rp10.590.455.100,00	5.05

5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp19.266.353.234,00	Rp640.915.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.907.268.234,00	Rp24.167.284.444,00	Rp1.929.308.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.096.592.444,00	Rp6.189.324.210,00	23.72	
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp120.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp120.000.000,00	Rp136.622.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp136.622.200,00	Rp16.622.200,00	12.17	
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan /Desa	Rp65.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.000.000,00	Rp65.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.000.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan /Desa	Rp55.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.000.000,00	Rp71.622.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.622.200,00	Rp16.622.200,00	23.21	
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp16.282.613.784,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.282.613.784,00	Rp20.906.737.364,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.906.737.364,00	Rp4.624.123.580,00	22.12	
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan /Desa	Rp15.287.163.884,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.287.163.884,00	Rp19.843.527.464,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.843.527.464,00	Rp4.556.363.580,00	22.96	

5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp758.449.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp758.449.900,00	Rp826.209.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp826.209.900,00	Rp67.760.000,00	8.20	
5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp72.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.000.000,00	Rp72.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.000.000,00	Rp0,00	0.00	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												T
							T	Tahun										Bertambah / Berkurang)		T
							1	Sebelum					Setelah							1
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	

5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	0.00
5	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	0.00
5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00	Rp0,00	0.00
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Daerah	Perangkat		Rp175.069.490,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp175.069.490,00	Rp175.069.490,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp175.069.490,00	Rp0,00	0.00

5	02	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp100.069.490,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.069.490,00	Rp100.069.490,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.069.490,00	Rp0,00	0.00
5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp75.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.000.000,00	Rp75.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.000.000,00	Rp0,00	0.00
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp1.568.456.170,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.568.456.170,00	Rp1.693.041.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.693.041.600,00	Rp124.585.430,00	7.36
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp77.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.360.000,00	Rp77.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.360.000,00	Rp0,00	0.00

5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp199.172.240,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp199.172.240,00	Rp219.263.670,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp219.263.670,00	Rp20.091.430,00	9.16	
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp68.601.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.601.450,00	Rp68.601.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.601.450,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp298.384.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp298.384.000,00	Rp298.384.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp298.384.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan,	Rp850.296.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp850.296.000,00	Rp954.790.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp954.790.000,00	Rp104.494.000,00	10.94	
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								Tahun											Bertambah / Berkurang)	T

							1 Sebelum					1 Setelah					Rp	%		
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah				
5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kelurahan/Desa	Rp74.642.480,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.642.480,00	Rp74.642.480,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.642.480,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp37.160.050,00	Rp640.915.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp678.075.050,00	Rp38.660.050,00	Rp1.744.308.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.782.968.050,00	Rp1.104.893.000,00	61.97	
5	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp550.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp550.000.000,00	Rp0,00	Rp1.313.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.313.500.000,00	Rp763.500.000,00	58.13	

5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp2.192.770,00	Rp19.527.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.719.770,00	Rp2.192.770,00	Rp71.220.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp73.412.770,00	Rp51.693.000,00	70.41
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp34.967.280,00	Rp71.388.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp106.355.280,00	Rp36.467.280,00	Rp359.588.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp396.055.280,00	Rp289.700.000,00	73.15
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp459.211.220,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp459.211.220,00	Rp481.711.220,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp481.711.220,00	Rp22.500.000,00	4.67
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp311.807.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp311.807.000,00	Rp311.807.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp311.807.000,00	Rp0,00	0.00

5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp147.404.220,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp147.404.220,00	Rp169.904.220,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp169.904.220,00	Rp22.500.000,00	13.24	
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp623.842.520,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp623.842.520,00	Rp735.442.520,00	Rp185.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp920.442.520,00	Rp296.600.000,00	32.22	
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp351.383.170,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp351.383.170,00	Rp384.983.170,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp384.983.170,00	Rp33.600.000,00	8.73	
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp51.280.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.280.000,00	Rp51.280.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.280.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Dana Transfer	Kab. Bengkulu Selatan, Semua	Rp221.179.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp221.179.350,00	Rp299.179.350,00	Rp185.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp484.179.350,00	Rp263.000.000,00	54.32	
Urusa	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Jumlah												

					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun					Bertambah / Berkurang)		T 1					
								Sebelum					Setelah					Rp	%	
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			Jumlah
					Lainnya	Umu m- Dana Aloka si Umu m	Kecamata n, Semua Kelurahan /Desa													
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			Rp4.273.552.660,00	Rp0,00	Rp2.193.092.000,00	Rp171.508.840.000,00	Rp177.975.484.660,00	Rp4.880.209.050,00	Rp0,00	Rp2.193.092.000,00	Rp175.001.310.000,00	Rp182.074.611.050,00	Rp4.099.126.390,00	2.25	
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			Rp1.623.000.680,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.623.000.680,00	Rp1.714.941.480,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.714.941.480,00	Rp91.940.800,00	5.36	
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m		Rp256.352.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp256.352.850,00	Rp256.352.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp256.352.850,00	Rp0,00	0.00	
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan /Desa	Rp154.322.190,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp154.322.190,00	Rp193.760.190,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp193.760.190,00	Rp39.438.000,00	20.35	

5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan /Desa	Rp563.241.470,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp563.241.470,00	Rp501.321.470,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp501.321.470,00	(Rp61.920.000,00)	(12.35)
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan /Desa	Rp545.719.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp545.719.000,00	Rp633.362.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp633.362.000,00	Rp87.643.000,00	13.84
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan /Desa	Rp103.365.170,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp103.365.170,00	Rp130.144.970,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.144.970,00	Rp26.779.800,00	20.58
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			Rp1.199.999.980,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.199.999.980,00	Rp1.449.999.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.449.999.900,00	Rp249.999.920,00	17.24

5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp404.879.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp404.879.700,00	Rp359.818.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp359.818.400,00	(Rp45.061.300,00)	(12.52)	
5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp73.459.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp73.459.050,00	Rp99.458.930,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.458.930,00	Rp25.999.880,00	26.14	
5	02	02	2.02	0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp183.801.020,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp183.801.020,00	Rp264.212.540,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp264.212.540,00	Rp80.411.520,00	30.43	
5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan,	Rp164.351.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp164.351.600,00	Rp223.333.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp223.333.600,00	Rp58.982.000,00	26.41	
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								Tahun												
								Bertambah / Berkurang)												T

							1 Sebelum					Setelah					Rp	%	1
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
					Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dana Alokasi Umum	Semua Kelurahan/Desa												
5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga PFK	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp196.331.810,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp196.331.810,00	Rp266.331.630,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp266.331.630,00	Rp69.999.820,00	26.28
5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp177.176.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp177.176.800,00	Rp236.844.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp236.844.800,00	Rp59.668.000,00	25.19
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			Rp1.200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.200.000.000,00	Rp1.300.006.830,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.300.006.830,00	Rp100.006.830,00	7.69

5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp188.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp188.550.000,00	Rp270.125.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp270.125.200,00	Rp81.575.200,00	30.20
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp280.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp280.000.000,00	Rp404.705.630,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp404.705.630,00	Rp124.705.630,00	30.81
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp601.450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp601.450.000,00	Rp440.033.620,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp440.033.620,00	(Rp161.416.380,00)	(36.68)

5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp130.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.000.000,00	Rp185.142.380,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp185.142.380,00	Rp55.142.380,00	29.78		
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			Rp250.552.000,00	Rp0,00	Rp2.193.092.000,00	Rp171.508.840.000,00	Rp173.952.484.000,00	Rp415.260.840,00	Rp0,00	Rp2.193.092.000,00	Rp175.001.310.000,00	Rp177.609.662.840,00	Rp3.657.178.840,00	2.06		
5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp250.552.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp171.508.840.000,00	Rp171.759.392.000,00	Rp415.260.840,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp175.001.310.000,00	Rp175.416.570.840,00	Rp3.657.178.840,00	2.08		
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.193.092.000,00	Rp0,00	Rp2.193.092.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.193.092.000,00	Rp0,00	Rp2.193.092.000,00	Rp0,00	0.00		
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			Rp1.285.320.240,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.285.320.240,00	Rp1.587.324.740,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.587.324.740,00	Rp302.004.500,00	19.03		
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								Tahun												Bertambah / Berkurang)	T

							1 Sebelum					Setelah					Rp	%		
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah				
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah		Rp1.285.320.240,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.285.320.240,00	Rp1.587.324.740,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.587.324.740,00	Rp302.004.500,00	19.03		
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp384.078.910,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp384.078.910,00	Rp395.954.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp395.954.150,00	Rp11.875.240,00	3.00	
5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp65.812.780,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.812.780,00	Rp71.946.780,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.946.780,00	Rp6.134.000,00	8.53	
5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp7.994.970,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.994.970,00	Rp7.989.820,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.989.820,00	(Rp5.150,00)	(0.06)	

5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp104.390.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.390.000,00	Rp138.449.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp138.449.400,00	Rp34.059.400,00	24.60
5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp147.159.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp147.159.800,00	Rp211.159.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp211.159.600,00	Rp63.999.800,00	30.31
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp298.269.480,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp298.269.480,00	Rp368.269.990,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp368.269.990,00	Rp70.000.510,00	19.01
5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp60.848.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.848.300,00	Rp99.309.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.309.100,00	Rp38.460.800,00	38.73

5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp71.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.000.000,00	Rp107.809.320,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp107.809.320,00	Rp36.809.320,00	34.14		
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp105.030.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp105.030.000,00	Rp128.360.680,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp128.360.680,00	Rp23.330.680,00	18.18		
					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								Tahun										Bertambah / Berkurang)			
								Sebelum					Setelah								
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%		T 1
5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp40.736.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.736.000,00	Rp58.075.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.075.900,00	Rp17.339.900,00	29.86		

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan LAKIP BKD Bengkulu Selatan Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi, Isu Strategis serta Sistematika penyusunan LAKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Strategi dan Perjanjian, Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Perjanjian Kinerja, Rencana Anggaran Badan Keuangan Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan tentang Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

BAB IV PENUTUP

Mengemukakan tinjauan secara umum dengan menjelaskan keberhasilan atau kegagalan, Solusi dan Hambatan yang berkaitan dengan kinerja Badan Keuangan Daerah serta strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya.

B A B II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat berjalan secara partisipatif, koordinatif, sinergis, dan komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 – 2026. Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan masih menghadapi beberapa kendala. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan dalam proses pelayanan. Berikut ini akan diuraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah.

Fungsi rencana strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan adalah ;

Tabel 2.1.1

Identifikasi Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Opini BPK terhadap LKPD	Kurangnya fasilitas jaringan / server SIMDA yang kurang memadai	Kualitas dan efektifitas pengelolaan data dan informasi keuangan berbasis elektronik kurang memadai
			Integrasi aplikasi sistem informasi belum maksimal

			Kualitas dan efektifitas pelayanan , pengelolaan data dan informasi keuangan dalam kerangka transparansi belum optimal
			Kapasitas sistem informasi keuangan daerah dan integrasinya belum optimal
		Minimnya dana untuk melakukan sosialisasi Bimtek	Masih kurangnya sosialisasi tentang pengelolaan keuangan daerah meliputi pengelolaan perbendaharaan, implementasi akuntansi berbasis akrual
			Kualitas pembinaan pengelolaan keuangan daerah belum optimal
		Perlu peningkatan SDM yang ada	Kompetensi, kapasitas , kualitas dan ontegritas aparatur pengelolaan keuangan masih perlu ditingkatkan
2	Inventarisasi Pengamanan dan Pemanfaatan Aset	Personel dibidang pengelolaan BMD yang kurang mampu dan tanggap untuk menyelesaikan setiap permasalahan baik itu aset tetap maupun aset lainnya (SDM yang kurang profesional)	Aset tetap dan aset lainnya dari setiap OPD untuk mengusulkan tentang pemusnahan dan penghapusan ke bidang pengelolaan BMD kurang respon/kurang tanggap
3	Penerimaan pendapatan daerah	Terdapat masyarkat wajib pajak yang belum taat dalam pembayaran pajak daerah	Tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah

		Keterbatasan SBM dalam hal ini petugas penatausahaan, tenaga dalam bidang penilaian , penagihan , dan pemeriksaan	Sumber daya manusia yang mengelola sangat terbatas
		Sarana dan prasarana yang belum menunjang guna mengoptimalkan potensi pajak daerah	Infrastruktur sarana dan prasarana yang belum memadai dan belum berbasis aplikasi
5	Penetapan perda APBD tepat waktu	Panjangnya rentang waktu diukur sebelum perencanaan dan penganggaran dapat diinput dalam proses dan tahapan penyusunan APBD, sehingga semua tahapan tidak dapat dipenuhi secara konsisten	Panjangnya rentang waktu diskkursus sebelum perencanaan dan penganggaran dapat diinput dalam proses dan tahapan penyusunan APBD, sehingga semua tahapan tidak dapat dipenuhi secara konsisten
		Perbedaan persefektif dan kepentingan melibatkan tarik-ulur pembahasan yang kompleks, dan adakalanya memunculkan defiasi dari alur APBD yang telah direncanakan	Perbedaan persefektif dan kepentingan melibatkan tarik-ulur pembahasan yang kompleks, dan adakalanya memunculkan defiasi dari alur APBD yang telah direncanakan

Rencana strategis yang disusun merupakan langkah awal untuk melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan yang dalam penyusunannya mengacu pada visi dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem laporan kinerja (LKJ).

Proses penyusunan Rancangan Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari beberapa tahap yaitu : tahap pertama : persiapan penyusunan renstra meliputi pembentukan tim penyusun, orientasi mengenai Renstra dan penyusunan agenda kerja tim renstra serta pengumpulan data dan informasi. Tahap kedua : penyusunan rancangan Renstra yang terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu tahap perumusan rancangan renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra. Tahap ketiga : penetapan Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Penyusunan Renstra Badan keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi bagian penting dari pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian Renstra memiliki keterkaitan dengan dokumen lainnya baik itu dokumen perencanaan tingkat nasional maupun daerah. Gambaran mengenai

keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan dalam bagan berikut:



Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 28 Tahun 2023 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah Bidang Keuangan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah, fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ;

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi di Bidang keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan;
- e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Reformasi Birokrasi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Badan Keuangan Daerah memiliki tugas dan fungsi memberi pelayanan , akurat, dan terpadu pada masyarakat sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi serta Visi dan Misi Kepala Daerah.

A. Visi, Misi dan Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

Tabel 2.1.2

Visi	Misi	Sasaran Daerah
Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan EMAS (Elok, Maju, Aman, Dan Sejahtera) Berlandaskan Cinta –BS	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersifat serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan Keuangan pemerintah daerah

B. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tabel 2.1.3

Visi :Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan EMAS (Elok, Maju, Aman, Dan Sejahtera) Berlandaskan Cinta –BS			
Misi 4 : Mewujudkan tata kelolan pemerintahan yang baik dan bersifat serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi			
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan Keuangan pemerintah daerah	Implementasi kebijakan dan Pentahapan pembayaran Non Tunai;	Penyesuaian kebijakan dan percepatan penggunaan aplikasi penatausahaan keuangan serta meminimalkan penggunaan uang tunai;
		Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah secara terpadu;	Implementasi kebijakan dan pentahapan Pembayaran Non Tunai; Perluasan dan pengendalian pembayaran belanja non tunai, baik pengeluaran maupun penerimaan;
		Optimalisasi pengelolaan asset daerah secara terpadu;	Inventarisasi dan validasi Aset serta percepatan kebijakan pengamanan dan pemanfaatan Aset; Integrasi Sistem Tata Usaha Aset dan Pemanfaatan, upaya mengurangi prosentase Aset yang belum diamankan secara fisik dan administrative serta alternatif pemanfaatan untuk dukungan PAD;

		Melakukan validasi data terkait aset di pengguna yang masih layak digunakan untuk mendukung tuis yang akan dimanfaatkan dengan mempertimbangkan kondisi dan status aset melalui BMD	Ketepatan jumlah dan nilai barang melalui sensus BMD guna optimalisasi Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah.
		Menerapkan asa efesiensi ,efektifitas dan akuntabilitas serta disiplin anggaran dalam menyusun rencana belanja pada program dan kegiatan	Semakin ketatnya regulasi dan instruksi pemerintah dalam penyelsaian APBD maka minset stakholder dalam perencanaan dan penganggaran dapat terdiseminasikan
			Mengoptimalkan capaian fisik kegiatan dan capaian indikator Renstra.
		Peningkatan kapasitas SDM , Penguatan infrastruktur teknologi, Kolaborasi antar pemerintah	Menjamin efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja pemerintah daerah, Menjamin integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah.

Sumber Data : RENSTRA BKD

2.2 Perjanjian Kinerja

2.2.1 Perjanjian Kinerja Eselon II

Lampiran I : PERJANJIAN KINERJA
Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

OPD : Badan Keuangan Daerah
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 19.907.268.234	
2. Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.177.975.484.660	
3. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 1.285.320.240	

Lampiran II : Perjanjian Kinerja Tambahan
Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan

**PERJANJIAN PEJABAT STRUKTURAL UNTUK
PENCAPAIAN TARGET KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

	URAIAN	TARGET	KETERANGAN
	Penguatan AKIP pada PD	BB	
	1) Perencanaan kinerja	24	Dari bobot 30
	2) Pengukuran kerja	24	Dari bobot 30
	3) Pelaporan kinerja	12	Dari bobot 15
	4) Evaluasi kinerja	20	Dari bobot 25
	Jumlah inovasi yang dibangun dan dikembangkan	Minimal 1 Inovasi	Terimplementasi dengan baik
	Penerapan dan evaluasi SPIP pada PD	Level 3	Laporan pelaksanaan SPIP
	Indeks Manajemen Resiko Perangkat Daerah	Level 3	Laporan implementasi MRI
	Terkelolanya data sektoral Perangkat Daerah	100%	memenuhi elemen data sektoral
	Tata Kelola dan tindak lanjut pemeriksaan keuangan PD	TL 100%	Tindak lanjut temuan pemeriksaan keuangan
	Ketertiban Manajemen BMD	100 %	Rekonsiliasi asset
	Realisasai Pelaksanaan Program / Kegiatan Perangkat Daerah		
	1) Sumber Dana APBN (Bagi yang ada)	100%	Laporan Setiap Triwulan
	2) Sumber Dana APBD	100%	
	Partisipasi dalam Agenda Pemerintah		Evaluasi per triwulan
	1) Rapat penting DPRD	100%	
	2) Rapat penting kedinasasn	100%	
	Penerapan dan pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM)	100%	

2.2.2 Perjanjian Kinerja Eselon III Bidang BMD

Lampiran:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan
	Tertibnya Penatausahaan Kendaraan Dinas Bermotor	Persentase Kendaraan Dinas Bermasalah yang Sudah diselesaikan	Dokumen
	Tertibnya Aset Tanah dan Kendaraan Dinas Pemerintah Daerah	Persentase Tanah yang Sudah Bersertifikat dan Kendaraan Dinas yang Mempunyai Bukti Kepemilikan	Dokumen
	Terbitnya Standar Satuan Harga	Persentase Standar Satuan Harga	Dokumen
	Terbitnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen
	Terbitnya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen
	Terbitnya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan
	Terbitnya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan
	Terbitnya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan
	Terbitnya Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan
	Terbitnya Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan	Persentase Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan	Dokumen

Sub Kegiatan

Inventarisasi Barang Milik Daerah
 Pengamanan Barang Milik Daerah
 Penyusunan Standar Harga
 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD
 Penyusunan Kebijakan Barang Milik Daerah
 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik

Anggaran

Rp.147.159.800
Rp.298.269.480
Rp.384.078.910
Rp.65.812.780
Rp. 7.894.970
Rp. 40.736.000

Daerah	
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp. 105.030.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rp.104.390.000
Penilaian Barang Milik Daerah	Rp. 60.848.300
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,Pemindah tanganan,Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Rp. 71.000.000
	RP. 1.285.220.240

Lampiran II : Perjanjian Kinerja Tambahan
Pejabat Pengawas
Kabupaten Bengkulu Selatan

**PERJANJIAN PEJABAT STRUKTURAL UNTUK
PENCAPAIAN TARGET KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

NO	URAIAN	TARGET	KETERANGAN
1	Penguatan SAKIP dan Reformasi Birokrasi pada OPD		
	Perencanaan kinerja	5 Dokumen	Perjanjian kinerja Indikator kinerja utama Cascading Pohon kinerja Rencana aksi
	Pengukuran kinerja	4 Dokumen	Laporan pencapaian target IKU
2	Nilai laporan pelaksanaan program dan kegiatan	1 Dokumen	Laporan Triwulan
3	Kelengkapan dokumen administrasi kinerja bagian (SOP, KAK)	1 Laporan	Harus di publikasi pada website OPD

2.2.3 Perjanjian Kinerja Eselon III Bidang AKuntansai

Lampiran:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BADAN KEUANGAN DAERAH

	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target
	Rekonsiliasi dan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD	Prosentase Satuan Kerja Perangkat Dalam Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	Dokumen	7 Dokumen
	Rekonsiliasi Dan Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten	Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tepat Waktu	Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen
	Pembinaan Pengelolaan Sistem Akuntansi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual	Prosentase Satuan Kerja Perangkat Dalam Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	SKPD	40 SKPD
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Prosantse Jumlah Data Laporan Keuangan SKPD yang dismpaikan tepat waktu	SKPD	40 OPD

Sub Kegiatan

Anggaran

Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, Dan Laporan Keuangan Pemerintah

Rp.280.000.000

Koordinasi Dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Rp.601.450.000

Pembinaan Akuntansi, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

Rp. 130.000.000

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah

Rp.188.550.000

Total

Rp.1.200.000.000

Lampiran II : Perjanjian Kinerja Tambahan
 Pejabat Pengawas
 Kabupaten Bengkulu Selatan

**PERJANJIAN PEJABAT STRUKTURAL UNTUK
 PENCAPAIAN TARGET KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

NO	URAIAN	TARGET	KETERANGAN
1	Penguatan SAKIP dan Reformasi Birokrasi pada OPD		
	Perencanaan kinerja	5 Dokumen	Perjanjian kinerja Indikator kinerja utama Cascading Pohon kinerja Rencana aksi
	Pengukuran kinerja	4 Dokumen	Laporan pencapaian target IKU
2	Nilai laporan pelaksanaan program dan kegiatan	1 Dokumen	Laporan Triwulan
3	Kelengkapan dokumen administrasi kinerja bagian (SOP, KAK)	1 Laporan	Harus di publikasi pada website OPD

2.2.4 Perjanjian Kinerja Sekretaris Badan Keuangan Daerah

Lampiran:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BADAN KEUANGAN DAERAH

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Nilai Akip	Nilai Akip BPKAD	Angka	80
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Adminstrasi Keuangan	Persentase Tindak Lanjut LHP BPK	Persentase	100 %
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Administrasi Umum Dan Kepegawaian	Indeks Kepuasan ASN	Angka	80

Program	Anggaran
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp .19.907.268.234
Total	Rp. 19.907.268.234
Kegiatan	
1 Perencanaan, Penganggaran , Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 120.000.000
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 16.282.613.784
3 Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 175.069.490
4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.1.568.456.170
5 Penyediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 459.211.220
6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 678.075.050
7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 623.842.520

Lampiran II : Perjanjian Kinerja Tambahan
 Pejabat Administrator
 Kabupaten Bengkulu Selatan

**PERJANJIAN PEJABAT STRUKTURAL UNTUK
 PENCAPAIAN TARGET KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

NO	URAIAN	TARGET	KETERANGAN
1	Penguatan SAKIP dan Reformasi Birokrasi pada OPD		
	Perencanaan kinerja	5 Dokumen	Perjanjian kinerja Indikator kinerja utama Cascading Pohon kinerja Rencana aksi
	Pengukuran kinerja	4 Dokumen	Laporan pencapaian target IKU
2	Nilai laporan pelaksanaan program dan kegiatan	1 Dokumen	Laporan Triwulan
3	Kelengkapan dokumen administrasi kinerja bagian (SOP, KAK)	1 Laporan	Harus di publikasi pada website OPD
4	Partisipasi dalam agenda pemerintahan Rapat penting DPRD Rapat penting kedinasan	70 % 70 %	Catatan : untuk acara yang mengundang pejabat administrator
5	Keterbukaan informasi publik	1 website	Publikasi aktivitas kedinasan

2.2.5 Perjanjian Kinerja Eselon III Bidang Anggaran

Lampiran 1:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BADAN KEUANGAN DAERAH

	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	Penetapan Perda APBD tepat waktu	Penetapan Perda tentang APBD tepat waktu sesuai dengan tenggat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.	Persentase	100 %

Program

Anggaran

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Rp. 178.725.746.220-

Kegiatan Kordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Rp. 178.725.746.220-

Lampiran II : Perjanjian Kinerja Tambahan

Pejabat Administrator

Kabupaten Bengkulu Selatan

**PERJANJIAN PEJABAT STRUKTURAL UNTUK
PENCAPAIAN TARGET KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

NO	URAIAN	TARGET	KETERANGAN
1	Penguatan SAKIP dan Reformasi Birokrasi pada OPD		
	Perencanaan kinerja	11 Dokumen	Perjanjian kinerja Indikator kinerja utama Cascading Pohon kinerja Rencana aksi
	Pengukuran kinerja	11 Dokumen	Laporan pencapaian target IKU
2	Nilai laporan pelaksanaan program dan kegiatan	3 Dokumen	Laporan Triwulan
3	Kelengkapan dokumen administrasi kinerja bagian (SOP, KAK)	1 Laporan	Harus di publikasi pada website OPD
4	Partisipasi dalam agenda pemerintahan Rapat penting DPRD Rapat penting kedinasan	70 % 70 %	Catatan : untuk acara yang mengundang pejabat administrator
5	Keterbukaan informasi publik	1 website	Publikasi aktivitas kedinasan

2.2.6 Perjanjian Kinerja Eselon III Bidang Perbendaharaan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SKPD

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase serapan belanja daerah	Persentase	95 %

Program

Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah

Rp.1.199.999.980,-

Kegiatan

Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Rp.1.199.999.980,-

Total

Rp.1.199.999.980,-

Lampiran II : Perjanjian Kinerja Tambahan

Pejabat Administrator

Kabupaten Bengkulu Selatan

**PERJANJIAN PEJABAT STRUKTURAL UNTUK
PENCAPAIAN TARGET KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

NO	URAIAN	TARGET	KETERANGAN
1	Penguatan SAKIP dan Reformasi Birokrasi pada OPD		
	Perencanaan kinerja	Dokumen	Perjanjian kinerja Indikator kinerja utama Cascading Pohon kinerja Rencana aksi
	Pengukuran kinerja	4 Dokumen	Laporan pencapaian target IKU
2	Nilai laporan pelaksanaan program dan kegiatan	1 Dokumen	Laporan Triwulan
3	Kelengkapan dokumen administrasi kinerja bagian (SOP, KAK)	1 Laporan	Harus di publikasi pada website OPD
4	Partisipasi dalam agenda pemerintahan Rapat penting DPRD Rapat penting kedinasan	70 % 70 %	Catatan : untuk acara yang mengundang pejabat administrator
5	Keterbukaan informasi publik	1 website	Publikasi aktivitas kedinasan

2.1 Rencana Anggaran

A. Target Belanja

Anggaran dan realisasi belanja langsung Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mendukung pencapaian sasaran yang akan dicapai pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.1

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	199.168.072.934	198.181.523.920	94.48
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.907.268.234	17.499.409.111	67.06
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120,000,000	136,035,454	99.57
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65,000,000	64,889,800	99.83
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55,000,000	71,145,654	99.33
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.282.613.784	12.714.990.597	60.82
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15,287,163,884	11,664,584,397	58.78
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	758,449,900	819,126,100	99.14
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40,000,000	39,936,100	99.84
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	72,000,000	69,647,900	96.73
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	40,000,000	38,877,600	97.19
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	25,000,000	24,764,700	99.06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60,000,000	58,053,800	96.76
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	175,069,490	93,156,400	53.21
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	100,069,490	76,156,400	76.10
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75,000,000	17,000,000	22.67
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,568,456,170	1,525,286,725	90.09
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	77,360,000	74,030,400	95.70
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	199,172,240	218,203,000	99.52
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	68,601,450	68,571,000	99.96
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	298,384,000	143,370,000	48.05
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	850,296,000	946,512,325	99.13
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	74,642,480	74,600,000	99.94
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	678,075,050	1,736,460,000	97.39
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	550,000,000	1,289,400,000	98.17
Pengadaan Mebel	21,719,770	71,220,000	97.01
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	106,355,280	375,840,000	94.90
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	459,211,220	433,606,105	90.01

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	311,807,000	265,820,255	85.25
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	147,404,220	167,785,850	98.75
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	623,842,520	859,873,830	93.42
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	351,383,170	324,961,330	84.41
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51,280,000	51,204,000	99.85
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	221,179,350	483,708,500	99.90
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	177.975.484.660	179.209.020.203	98.43
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1,623,000,680	1,631,445,569	95.13
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	256,352,850	253,995,539	99.08
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	154,322,190	187,455,680	96.75
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	563,241,470	476,418,108	95.03
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	545,719,000	602,316,456	95.10
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	103,365,170	111,259,786	85.49
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1,199,999,980	1,441,155,877	99.39
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	404,879,700	354,746,236	98.59

Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	73,459,050	99,371,356	99.91
La Penatausahaan Pembiayaan Daerah	183,801,020	263,332,839	99.67
Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	164,351,600	222,370,649	99.57
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	196,331,810	265,107,425	99.54
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	177,176,800	236,227,372	99.74
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1,200,000,000	1,050,633,275	80.82
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	188,550,000	255,756,773	94.68
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	280,000,000	330,238,643	81.60
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	601,450,000	346,149,809	78.66
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	130,000,000	118,488,050	64.00
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	173.952.484.000	175.085.785.482	98.58

Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	171.759.392.000	175.085.785.482	99.81
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2,193,092,000	0	0.00
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1,285,320,040	1,473,094,606	92.80
Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,285,320,040	1,473,094,606	92.80
Penyusunan Standar Harga	384,078,910	368,228,400	93.00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	65,812,780	61,256,300	85.14
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	7,994,970	4,899,000	61.32
Penatausahaan Barang Milik Daerah	104,390,000	127,302,721	91.95
Inventarisasi Barang Milik Daerah	147,159,600	206,736,150	97.91
Pengamanan Barang Milik Daerah	298,269,480	335,742,470	91.17
Penilaian Barang Milik Daerah	60,848,300	98,769,250	99.46
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	71,000,000	105,322,794	97.69
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	105,030,000	122,044,921	95.08
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	40,736,000	42,792,600	73.68

B. Alokasi Anggaran Strategis

ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS

Table 2.1.2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	ANGGARAN
1	Penetapan Perda APBD tepat waktu	Penetapan Perda APBD tepat waktu	Penetapan Perda APBD tepat waktu	Penetapan Perda Tentang APBD tepat waktu sesuai dengan tenggat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan	Rp. 1.623.000.680
2	Meningkatnya Pengelolaan Akuntansi Keuangan SKPD	Meningkatnya Pengelolaan Akuntansi Keuangan SKPD	Meningkatnya Pengelolaan Akuntansi Keuangan SKPD	Penetapan Perda Tantang Pertanggung Jawaban APBD tepat waktu sesuai dengan tenggat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan	Rp. 23.999.999.80
3	Penatausahaan BMD Berdasarkan Prosedur dan Aturan	Penatausahaan BMD Berdasarkan Prosedur dan Aturan	Penatausahaan BMD Berdasarkan Prosedur dan Aturan	- Seluruh BMD Terinventarisasi dengan Baik	Rp. 1.285.320.240
				- Selesainya Temuan Aset Tetap dan Aset Lainnya	
4	Meningkatnya Nilai AKIP	Meningkatnya Nilai AKIP	Meningkatnya Nilai AKIP	1.Nilai AKIP BPKAD	Rp. 120.000.000
5	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Adminstrasi Keuangan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Adminstrasi Keuangan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Adminstrasi Keuangan	2.Persentase tindak lanjut LHP BPK	Rp. 16.282.613.784

z

6	Meningkatnya tata kelola pelayanan administrasi umum dan kepegawaian	Meningkatnya tata kelola pelayanan administrasi umum dan kepegawaian	Meningkatnya tata kelola pelayanan administrasi umum dan kepegawaian	3. Indeks Kepuasan ASN	Rp. 95.046.54450
7	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tersalurnya Dana Bantuan	Rp. 173.952.484.000

Sumber : IKU dan DPA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi Kepala Daerah dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan di Badan Keuangan Daerah.

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan.

Sasaran dan indikator kinerja sasaran tersebut adalah merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana tolak ukur kinerja kebijakan Kepala Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021–2026. Sasaran Strategis dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 – 2026 dan secara proporsional untuk Tahun 2024 telah berjalan baik, meskipun masih ada yang tidak memenuhi target sasaran yang telah ditetapkan.

Dari *Misi-misi* tersebut diimplementasikan menjadi *Tujuan*, *Sasaran* dan *Program* yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2024, dengan indikator masukan (input), indikator keluaran (output) maupun indikatorhasil (outcome) seluruhnya telah dapat dilaksanakan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi, Misi Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok-kelompok indikator kinerja. Pengukuran kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektifitas.

Berbagai metode atau cara yang dapat digunakan dalam mengukur sejauhmana capaian kinerja OPD, salah satunya dengan membandingkan antara realisasi dan target yang tertuang dalam indikator kinerja sasaran. Semakin tinggi persentase perbandingan antara realisasi dengan target, maka semakin tinggi pula capaian kinerjanya. Seberapa besar capaian indikator sasaran Badan Keuangan Daerah, akan dapat dilihat dari seberapa persen rasio antara realisasi dan target yang terdapat pada masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut: Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024

Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang ingin dicapai pada tahun 2024 tercermin dalam program-program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan keuangan Daerah ;
3. Program Pengelolaan barang Milik Daerah.

Sedangkan capaian kinerja berdasarkan pada sasaran organisasi bisa dilihat pada table 3.2 dibawah ini ;

Tabel 3.2
Ringkasan Capaian Kinerja Pada Indikator Utama

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja 2023	Capaian Kinerja 2024	Capaian tahun 2024			Targer Akhir Renstra 2026	Capaian s.d 2024 thd Target Renstra
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	Belum Kaluar Hasil WTP / WDP	WTP	Belum Kaluar Hasil WTP / WDP	Belum Kaluar Hasil WTP / WDP	WTP	WTP

Capaian Kinerja tahun 2024 belum keluar hasilnya apakah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Dengan Pengecualian disebabkan karena pada saat ini Badan Pemeriksa Keuangan sedang melakukan Pemeriksaan sehingga opini BPK belum diketahui hasil yang didapat Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, Hasil tersebut dapat diperkirakan akan diketahui pada bulan Mei Mendatang apakah hasil tersebut sesuai target atau tidak.

Tabel 3.3
Ringkasan Capaian Kinerja Per 2 Tahun

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023	Capaian Kinerja 2024	Capaian tahun 2024			Targer Akhir Renstra 2026	Capaian s.d 2024 thd Target Renstra
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	Belum Kaluar Hasil WTP / WDP	WTP	Belum Kaluar Hasil WTP / WDP	Belum Kaluar Hasil WTP / WDP	WTP	WTP

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2022 Opini WTP ini diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2022, pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Kembali Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan pada tahun 2024 Opini BPK belum diketahui hasilnya apakah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP) hasil tersebut diperkirakan akan keluar pada bulan Mei Mendatang.

Tabel 3.4
Pencapaian IKU Per Triwulan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja 2024	Capaian tahun 2024			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1.	Penetapan Perda Tentang APBD tepat waktu sesuai dengan tenggat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan	100	20	25	25	30
2.	Penetapan Perda Tantang Pertanggung Jawaban APBD tepat waktu sesuai dengan tenggat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan	100	25	25	25	25

3.	Seluruh BMD Terinventarisasi dengan Baik	100	25	25	20	30
4.	Nilai AKIP BPKAD	81	20	20	20	21
5.	Persentase tindak lanjut LHP BPK	100	25	25	25	25
6.	Indeks Kepuasan ASN	82.5	20	20	20	22.5
7.	Persentase Tersaluranya Dana Bantuan	100	25	25	25	25

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Utama

Sasaran 1 :

Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan Keuangan pemerintah daerah

Tabel 3.2.1

Ringkasan Capaian Kinerja Pada Indikator Utama

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	Belum Kaluar Hasil WTP / WDP	-
Rata- rata Capaian					-

Pada tahun 2024 Opini BPK belum tau hasilnya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP) hasil tersebut keluar diperkirakan bulan Mei 2025 mendatang target Opini BPK pada Badan Keuangan Daerah pada tahun 2024 adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

✓ **Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau peningkatan/ Penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Analisis capaian kinerja sasaran strategis BKD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

a. Sasaran meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Keuangan Pemerintah Daerah target kinerja tahun 2024 yaitu B (100) dengan realisasi kinerja B (100) dan capaian 100 %. Keberhasilan pencapaian tersebut diperoleh karena adanya upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan dan dukungan serta komitmen dari semua pihak untuk meningkatkan kinerja BKD Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2024 diantaranya yaitu sebagai berikut :

- 1) Menggunakan informasi kinerja untuk menilai pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan program dan kegiatan tahun 2024. Informasi kinerja juga digunakan untuk meningkatkan kinerja pada BKD Kabupaten Bengkulu Selatan dengan di dukung implementasi SAKIP yang memadai;
- 2) Melaksanakan rapat pembahasan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja secara berkala setiap triwulan terhadap rencana aksi yang telah ditetapkan dengan menghadirkan semua PPTK serta menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- 3) Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang, mengumpulkan bukti data kinerja secara andal, menggunakan IKU dan IKI untuk menghitung penilaian kinerja.

Berdasarkan laporan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja BKD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024 masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya yaitu :

- 1) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment;
- 2) Laporan kinerja belum sepenuhnya dapat mempengaruhi budaya kinerja organisasi;
- 3) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum menggunakan teknologi informasi (aplikasi);
- 4) Peningkatan implementasi SAKIP belum sepenuhnya memberikan dampak dalam efektifitas dan efisiensi kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024

Terhadap permasalahan tersebut, diperlukan adanya perbaikan pada tahun

mendatang diantaranya yaitu :

- 1) Melakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian seluruh pegawai terhadap kinerja, baik berupa sosialisasi, optimalisasi penggunaan perangkat evaluasi kinerja secara berkala dan upaya-upaya lain yang lebih inovatif untuk menciptakan budaya berkinerja di lingkungan instansinya;
- 2) Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal dimanfaatkan secara terus menerus dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

Program prioritas kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih diantaranya yaitu :

1. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan.
2. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan.
3. Pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
4. Mengembangkan produktivitas sektor pertanian.
5. Meningkatkan pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat.
6. Pembangunan bidang industri dan ketenagakerjaan.
7. Pembangunan infrastruktur berkualitas dan terintegrasi.
8. Pembangunan kepariwisataan.
9. Pengembangan perikanan.
10. Penguatan perekonomian daerah.

Mengacu pada visi dan misi serta program kepala daerah terpilih tersebut, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah, antara lain:

Penghambat	Pendorong
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya fasilitas jaringan/serever SIMDA yang kurang memadai 2. Minimnya dana untuk melakukan sosialisasi Bimtek 3. Perlu peningkatan SDM yang ada 4. Cek fisik yang dilakukan kesegnap OPD atas aset tetap dan aset lainnya, usulan dari OPD tentang pemusnahan dan penghapusan penyampaiannya kebidang pengelolaan BMD waktu yang diberikan tidak sesuai/kurang respon 	<ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kompetensi dan pengetahuan pegelolaan keuangan b. Membaiknya kinerja pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan OPD c. Meningkatnya kualitas dan efektifitas layanan , pengelolaan data , informasi keuangan serta sarana dan prasarana yang memadai. d. Temuan LHP BPK atas aset tetap dan aset lainnya data dari OPD sudah disampaikan ada dan akan diselesaikan setelah ditindak lanjuti dengan pemusnahan dan

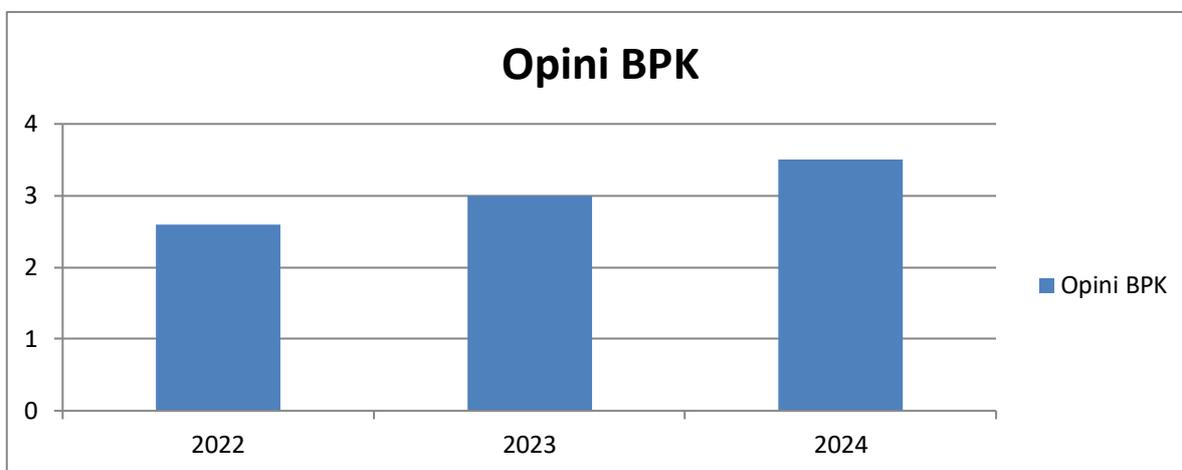
<ol style="list-style-type: none"> 5. Terlalu seringnya terjadi pergantian pejabat ASN 6. Belum adanya kesamaan paradigm bahwa Pendapatan Daerah merupakan kunci dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah 7. Dukungan penganggaran yang sangat rendah dalam membangun system pendapatan yang berbasis teknologi 8. Kompetensi ASN yang sangat rendah 9. Peningkatan kompetensi melalui Diklat, Bimtek yang tidak sejalan dengan kebutuhan. 10. Masih rendahnya kinerja personil 11. Semakin minimnya pendanaan untuk program dan kegiatan 	<p>penghapusan.</p> <ol style="list-style-type: none"> e. Pilihan aplikasi yang mendukung banyak tersedia oleh para pihak vendor penyedia. f. Jumlah ASN yang cukup banyak. g. Asistensi dari kementerian dan lembaga pengawas h. Evaluasi dan pelaporan vertikal yang kian digunakan
---	---

Telaah dimaksudkan untuk mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran sebagai berikut :

Penghambat	Pendorong
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang nya fasilitas jaringan/serever SIMDA yang kurang memadai 2. Minimnya dana untuk melakukan sosialisasi Bimtek 3. Perlu peningkatan SDM yang ada 4. Cek fisik yang dilakukan kesegenap OPD atas aset tetap dan aset lainnya, usulan dari OPD tentang pemusnahan dan penghapusan penyampaiannya kebidang pengelolaan BMD waktu yang diberikan tidak sesuai/kurang respon 5. Terlalu seringnya terjadi pergantian pejabat ASN 6. Belum adanya kesamaan paradigm bahwa Pendapatan Daerah merupakan kunci dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah 7. Dukungan penganggaran yang sangat rendah dalam membangun 	<ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kompetensi dan pengetahuan pegelolaan keuangan b. Membaiknya kinerja pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan OPD c. Meningkatnya kualitas dan efektifitas layanan , pengelolaan data , informasi keuangan serta sarana dan prasarana yang memadai. d. Temuan LHP BPK atas aset tetap dan aset lainnya data dari OPD sudah disampaikan ada dan akan diselesaikan setelah ditindak lanjuti dengan pemusnahan dan penghapusan. e. Pilihan aplikasi yang mendukung banyak tersedia oleh para pihak vendor penyedia. f. Jumlah ASN yang cukup banyak. g. Evaluasi dan pelaporan yang kian

<p>system pendapatan yang berbasis teknologi</p> <p>8. Kompetensi ASN yang sangat rendah</p> <p>9. Peningkatan kompetensi melalui Diklat, Bimtek yang tidak sejalan dengan kebutuhan.</p> <p>10. Masih rendahnya kinerja personil</p> <p>11. Semakin minimnya pendanaan untuk program dan kegiatan</p>	<p>digunakan</p>
--	------------------

Grafik 3.2.1
Opini BPK



Berdasarkan pada tabel 3.2.1 dan grafik 3.2.1 tersebut, dalam rangka mewujudkan sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan Keuangan pemerintah daerah” ini, ada Program – program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian target sasaran strategis tersebut beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan memang telah mencapai seperti :

Tabel.3.2.1.1
Kinerja Kegiatan Dan Sub Kegiatan yang Mendukung Opini BPK

No	Program	Sasaran Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja	
				Target	Realisasi
1	Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Pengolahan Data Laporan Keuangan Satuan Kegiatan	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	43 Dokumen	43 Dokumen

		Perangkat Daerah			
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	40 SKPD	40 SKPD
2	Penatausahaan BMD Berdasarkan Prosedur dan Aturan	Penatausahaan BMD yang Baik dan Benar	Penyusunan Standar Harga	1 Dokumen	1 Dokumen
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen
			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
			Penatausahaan	3	3

			Barang Milik Daerah	Dokumen	Dokumen
			Inventarisasi Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
			Pengamanan Barang Milik Daerah	40 SKPD	40 SKPD
			Penilaian Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen
			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Kali	1 Kali

Dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 berhasil memperoleh nilai capaian sasaran program sebesar 100 % yang diperoleh rata-rata pencapaian sasaran program sebesar 100 % dan capaian kinerja berkisar 99 % sampai dengan 100 % .

Badan Keuangan Daerah merupakan salah satu organisasi perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten Bengkulu Selatan yang melaksanakan urusan keuangan daerah. Sebagaimana telah dibahas pada sub bab diatas Badan Keuangan Daerah sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan sesuai urusan pemerintahan dan tugas pokok ,fungsi yang ditangani adalah pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam menganalisa kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah selama periode Renstra tahun

2021-2026 dengan mengukur capaian indikator kinerja utama (IKU) sebagai alat ukur sefesifik secara kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari unsur masukan ,proses,keluaran dan hasil yang menggambarkan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. gambaran mengenai pencapaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah



Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Laporan Realisasi Anggaran SKPD/ PPKD/Pemerintah daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/PPKD/Pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

Setiap OPD harus menyusun laporan keuangan OPD masing-masing yang telah ditetapkan Badan Keuangan Daerah, sehingga laporan keuangan tersebut dapat menjadi hasil dari penunjang untuk mencapai WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam mendukung keberhasilan pencapaian target sasaran strategis tersebut beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan di Bagian Pemerintahan memang telah mencapai target kinerja seperti:

Tabel.3.2.1.1 Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Akuntansi

No	Program	Sasaran Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja	
				Target	Realisasi
1	Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Pengolahan Data Laporan Keuangan Satuan Kegiatan Perangkat Daerah	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	43 Dokumen	43 Dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	40 SKPD	40 SKPD

Sumber Data :Bidang Akuntansi

Merupakan sasaran utama dari kinerja pelayanan pada sektor pelayanan daerah ukuran keberhasilan atau kegagalan dari kinerja pelayanan pada sektor ini adalah dengan diraihnya opini BPK RI atas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LHP, LKPD) pemberian opini tersebut sebagai bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan yang telah disusun oleh pemerintah daerah. LPKD sebagai media akuntabilitas atas sistem manajemen keuangan daerah yang disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP) meliputi sistem perencanaan dan penganggaran sistem pelaksanaan anggaran, sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang memenuhi unsur-unsur pengendalian internal dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan selama periode tahun 2021 – 2026 opini BPK atas hasil pemeriksaan LKPD yang telah diraih oleh pemerintah kabupaten Bengkulu Selatan yaitu ; tahun 2021 hasil pemeriksaan oleh BPK atas LKPD kabupaten Bengkulu Selatan adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) selama periode 4 tahun berikutnya pemerintah kabupaten Bengkulu Selatan hasil pemeriksaan oleh BPK atas LPKD kabupaten Bengkulu Selatan adalah WTP (Wajar Dengan Pengecualian) dan untuk 2024 belum tau apakah WTP atau WDP selain opini BPK RI atas LKPD sebagai indikator kinerja pengelolaan keuangan daerah yang lain adalah penyerapan belanja daerah setiap triwulan dibanding dengan anggaran belanja daerah yang dialokasikan setiap triwulan indikator kinerja tersebut sesuai dengan ketugasan BKD untuk mengatur manajemen kas guna menghindari pembayaran belanja daerah yang tidak tepat waktu sehingga pemanfaatan kas daerah dapat lebih optimal. Melalui anggaran kas dipergunakan untuk mengatur ketersediaan dan yang cukup sebagai perkiraan arus kas masuk dari pendapatan daerah untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana sebagaimana yang tercantum dalam DPA/DPPA SKPD yang telah disahkan sebagai perkiraan arus kas keluar. Selain itu anggaran KAS juga berfungsi sebagai alat kontrol dan pengendalian atas kinerja keuangan daerah dan manajemen kas dari mulai perencanaan sampai dengan pelaporan tentang aliran kas.

2. Penatausahaan Barang Milik Daerah

Menurut undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dalam pasal 156 ayat (1) disebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, dengan demikian persentase keakuratan data barang milik daerah merupakan salah satu indikator kinerja dari sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab BKD sebagai pembantu pengelolaan BMD yaitu : mengkoordinir pengelolaan BMD yang ada pada masing-masing SKPD / Unit kerja dan membantu pengelola BMD dalam melaksanakan kewenangannya maka dalam rangka mendapatkan data aset daerah kabupaten Bengkulu selatan sesuai dengan kondisi riil telah dilaksanakan kegiatan penatausahaan aset daerah yang meliputi kegiatan pembukuan inventarisasi dan pelaporan aset daerah. Setiap SKPD atau Unit kerja selaku pengguna barang atau jasa pengguna barang harus melakukan penatausahaan aset atas aset daerah yang berada dibawah penguasaannya. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi oleh pengguna barang/kuasa pengguna barang menyusun pelaporan aset daerah dengan menyajikan informasi terkait aset daerah pada waktu tertentu yaitu laporan semesteran dan laporan tahunan disampikan kepada bupati Bengkulu selatan melalui pengelolaan barang milik daerah. Laporan-laporan barang daerah yang disusun oleh pengguna / kuasa pengguna barang dihimpun oleh badan keuangan daerah selaku pembantu pengelolaan barang daerah menjadi laporan barang milik daerah yang dipergunakan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah daerah. Wewenang dan tanggungjawab BKD sebagai pembantu pengelolaan BMD yaitu mengkoordinir pengelolaan BMD yang ada pada masing-masing SKPD dan membantu pengelolaan BMD dalam melaksanakan. Sehingga dengan dilaksanakan pengelolaan barang milik daerah bertujuan agar terdapat kejelasan status kepemilikan barang milik daerah, optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah, pengamanan barang milik daerah, dan memenuhi kewajiban pemerintah daerah untuk melaporkan kondisi dan nilai barang milik daerah secara berkala. Persentase pengelolaan aset dengan baik yang meliputi pencapaian kinerja pada bidang aset :

1. Peningkatan penyelesaian temuan BPK terkait Aset tetap tanah dan kendaraan bermotor Tahun 2022 (40%), Tahun 2023 (60%), Tahun 2024 (80%)
 2. Peningkatan penyelesaian temuan BPK baik itu pemusnahan ,penghapusan aset lainnya Tahun 2022 (30%) , Tahun 2023 (40%), Tahun 2024 (40%)
 3. Peningkatan aplikasi SIMDA BMD dari manual ke aplikasi online yang sudah bisa di akses dari setiap OPD Tahun 2022 (100%), 2023 (100%), Tahun 2024 (100%).
- Kesimpulan dari 3 point diatas untuk tahun 2024 untuk Bidang Aset sudah terkelola dengan baik.

Berdasarkan undang-undang nomor 15 Tahun 2024 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan undang-undang nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 257/S/XVIII.BKL/05/2024 tanggal 20 Mei 2024.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan pernyataan Laporan Keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan perinsip akuntansi yang berlaku. Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan meliputi Realisasi Belanja yang sudah dianggarkan pada tahun berjalan 2024 salahsatunya dari sisi belanja yang menjadi Aset Daerah. Realisasi Belanja Daerah yang menjadi bahan fokus pemeriksaan yang menunjang Opini BPK dari sisi aset meliputi Belanja Modal, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Jasa Penunjang. Proses penyesuaian Realiasi Belanja Pemerintah Daerah dari keuangan yang menjadi aset dilakukan dengan mekanisme rekonsiliasi belanja yang dilakukan perbulan oleh pengurus barang OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk selanjutnya menjadi bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di akhir tahun berjalan.



Tabel.3.2.1.1.2. Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang BMD

No	Program	Sasaran Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja	
				Target	Realisasi
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan BMD yang Baik dan Benar	Penatausahaan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen
			Inventarisasi Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
			Rekonsiliasi dalam	4	4

			rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen	Dokumen
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen

Sumber Data :Bidang BMD

✓ **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Berikut disampaikan analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya untuk Tahun Anggaran 2024 pada tabel 3.2.2 ;

Tabel 3.2.2
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Capaian Kinerja (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pengelolaan Akuntansi Keuangan SKPD	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	7 Laporan	100	81.60
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	100	78.66
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah	40 Orang	100	64.00

		Kabupaten/Kota			
2	Penatausahaan BMD Berdasarkan Prosedur dan Aturan	Penatausahaan Barang Milik Daerah	3 Laporan	100	91.95
		Inventarisasi Barang Milik Daerah	1 Laporan	100	97.91
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	100	95.08
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	100	97.69

Sumber Data ; Bidang Akuntansi dan BMD

Berdasarkan tabel di atas dapat tergambar informasi bahwa dari masing-masing indikator di atas, memiliki dukungan anggaran dalam pencapaiannya, dari dua sasaran strategis yang mendukung pencapaian sasaran kinerja BKD, keseluruhannya memenuhi unsur efisiensi penggunaan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2024.

3.3 Realisasi Anggaran

Dalam mengukur hasil kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu selatan, indikator yang digunakan masukan, proses dan keluaran. Untuk rencana kegiatan tahun anggaran 2024 telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja untuk masing-masing kegiatan. Terhadap rencana kerja tahun 2024 maka ditetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran dan kegiatan kemudian berdasarkan data pencairan rencana kerja tahunan Tahun Anggaran 2024 dilakukan perbandingan rencana dengan realisasinya yang menghasilkan penilaian indikator kinerja. Selanjutnya terhadap nilai capaian masing-masing indikator kinerja di evaluasi pada bagian berikut bab ini.

Secara umum, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab utama organisasi. Semua sasaran strategi yang dilakukan untuk tahun 2024 dapat diwujudkan dengan baik. Pencapaian sasaran tahun 2024 dapat dilihat pada rincian masing-masing sasaran kinerja tahun 2024 diuraikan dibawah ini :

1. Meningkatnya komponen dan pemenuhan dokumen SAKIP pada kegiatan ini telah dilaksanakan seluruh nya rata-rata realisasi anggarannya mencapai 99 %
2. Meningkatnya pengelolaan administrasi keuangan OPD pada kegiatan ini telah dilaksanakan seluruh nya rata-rata realisasi anggarannya mencapai 98 %
3. Meningkatnya administrasi kepegawaian dan sarana prasarana aparatur pada kegiatan ini tidak dijalankan karena dananya dialihkan
4. Menigkatnya pengelolaan administrasi umum OPD pada kegiatan ini telah dilaksanakan seluruh nya rata-rata realisasi anggarannya mencapai 99 %
5. Meningkatnya jasa pelayanan urusan pemerintah pada OPD pada kegiatan ini telah dilaksanakan seluruh nya rata-rata realisasi anggarannya mencapai 91 %
6. Meningkatnya pengelolaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah pada kegiatan ini telah dilaksanakan seluruh nya rata-rata realisasi anggarannya mencapai 82 %
7. Meningkatnya barang milik daerah yang terpelihara dengan baik pada kegiatan ini telah dilaksanakan seluruh nya rata-rata realisasi anggarannya mencapai 100 %
8. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah pada kegiatan ini telah dilaksanakan realisasi anggaran nya mencapai 98 %
9. Terselenggaranya proses penganggaran daerah pada kegiatan ini telah dilaksanakan seluruh nya rata-rata realisasi anggarannya mencapai 98 %
10. Pengolahan data laporan keuangan satuan kegiatan prangkat daerah pada kegiatan ini telah dilaksanakan seluruh nya rata-rata realisasi anggarannya mencapai 99 %
11. Terkoordinasinya pengelolaan perbendaharaan daerah dengan baik pada kegiatan ini telah dilaksanakan seluruh nya rata-rata realisasi anggarannya mencapai 99 %

12. Penatausahaan BMD yang baik dan benar pada kegiatan ini telah dilaksanakan seluruhnya rata-rata realisasi anggarannya mencapai 99 %.

Tabel : 3.3.1

Indikator Sasaran Rencana dan Realisasi

Sasaran kegiatan	Indikator kegiatan	Persentase Awal	Persentase Setelah Realisasi Keuangan
Meningkatnya Komponen dan Pemenuhan Dokumen SAKIP	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	99,57 %
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan OPD	Persentase Laporan Administrasi Instansi Keuangan yang sesuai SAP	100 %	60,82 %
Meningkatnya Administrasi Kepegawaian dan Sarana Prasarana Aparatur	Profesional ASN	100 %	53,21 %
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum OPD	Indeks Kepuasan Pegawai	100 %	90,09 %
Meningkatnya Jasa Pelayanan Urusan Pemerintah pada OPD	Persentase Pelayanan urusan Pemerintah pada OPD dibutuhkan	100 %	91 %
Meningkatnya Pengelolaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	82 %
Meningkatnya Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan baik	Persentase BMD pada OPD yang dalam Kondisi Baik	100 %	100 %
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	Persentase Jumlah Desa Yang menerima bantuan	100 %	98 %
Terselenggaranya proses penganggaran daerah	Penetapan Perda APBD tepat waktu.	100 %	98 %

Pengolahan Data Laporan Keuangan Satuan Kegiatan Perangkat Daerah	Persentase Data Laporan Keuangan SKPD yang disampaikan Tepat Waktu	100 %	80,82 %
Terkoordinasinya Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan baik	Pengelolaan administrasi Perbendaharaan dan Keuangan di setiap OPD Tersusun dengan baik	100 %	99,39 %
Penatausahaan BMD yang Baik dan Benar	Seluruh BMD Tervalidasi dengan Baik	100 %	92,80 %

✓ **Tabel Realisasi Anggaran**

Target dari realisasi anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Rata – Rata hampir Mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya yang mana target yang telah ditentukan 100 % pencapaian sedangkan yang telah terealisasi bisa dilihat pada tabel 3.3.2 berikut ;

Tabel 3.3.2
REALISASI ANGGARAN APBD KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		Rp	(%)
Badan Keuangan Daerah	199.168.072.934	198.181.523.920	94.48
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.907.268.234	17.499.409.111	67.06
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120,000,000	136,035,454	99.57
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65,000,000	64,889,800	99.83
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55,000,000	71,145,654	99.33
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.282.613.784	12.714.990.597	60.82
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15,287,163,884	11,664,584,397	58.78
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	758,449,900	819,126,100	99.14
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40,000,000	39,936,100	99.84
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	72,000,000	69,647,900	96.73
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	40,000,000	38,877,600	97.19

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	25,000,000	24,764,700	99.06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	60,000,000	58,053,800	96.76
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	175,069,490	93,156,400	53.21
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	100,069,490	76,156,400	76.10
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75,000,000	17,000,000	22.67
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,568,456,170	1,525,286,725	90.09
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	77,360,000	74,030,400	95.70
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	199,172,240	218,203,000	99.52
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	68,601,450	68,571,000	99.96
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	298,384,000	143,370,000	48.05
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	850,296,000	946,512,325	99.13
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	74,642,480	74,600,000	99.94
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	678,075,050	1,736,460,000	97.39
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	550,000,000	1,289,400,000	98.17
Pengadaan Mebel	21,719,770	71,220,000	97.01
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	106,355,280	375,840,000	94.90
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	459,211,220	433,606,105	90.01

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	311,807,000	265,820,255	85.25
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	147,404,220	167,785,850	98.75
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	623,842,520	859,873,830	93.42
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	351,383,170	324,961,330	84.41
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51,280,000	51,204,000	99.85
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	221,179,350	483,708,500	99.90
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	177.975.484.660	179.209.020.203	98.43
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1,623,000,680	1,631,445,569	95.13
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	256,352,850	253,995,539	99.08
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	154,322,190	187,455,680	96.75
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	563,241,470	476,418,108	95.03
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	545,719,000	602,316,456	95.10
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	103,365,170	111,259,786	85.49
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1,199,999,980	1,441,155,877	99.39
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	404,879,700	354,746,236	98.59

Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	73,459,050	99,371,356	99.91
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	183,801,020	263,332,839	99.67
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	164,351,600	222,370,649	99.57
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	196,331,810	265,107,425	99.54
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	177,176,800	236,227,372	99.74
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1,200,000,000	1,050,633,275	80.82
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	188,550,000	255,756,773	94.68
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	280,000,000	330,238,643	81.60
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	601,450,000	346,149,809	78.66
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	130,000,000	118,488,050	64.00
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	173.952.484.000	175.085.785.482	98.58

Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	171.759.392.000	175.085.785.482	99.81
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2,193,092,000	0	0.00
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1,285,320,040	1,473,094,606	92.80
Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,285,320,040	1,473,094,606	92.80
Penyusunan Standar Harga	384,078,910	368,228,400	93.00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	65,812,780	61,256,300	85.14
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	7,994,970	4,899,000	61.32
Penatausahaan Barang Milik Daerah	104,390,000	127,302,721	91.95
Inventarisasi Barang Milik Daerah	147,159,600	206,736,150	97.91
Pengamanan Barang Milik Daerah	298,269,480	335,742,470	91.17
Penilaian Barang Milik Daerah	60,848,300	98,769,250	99.46
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	71,000,000	105,322,794	97.69
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	105,030,000	122,044,921	95.08
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	40,736,000	42,792,600	73.68

Sumber Data : Laporan Monev Triwulan BKD

3.4 Inovasi Perangkat Daerah

Dijelaskan inovasi yang sudah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

A. Inovasi Barang Milik Daerah

1. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan yang dilakukan Guna Penertiban Aset dengan melakukan cek fisik ke OPD - OPD untuk menyamakan data di SIMDA BMD dengan data yang ada di OPD agar terwujudnya tertib fisik dan tertib administrasi serta mempermudah dalam pelaksanaan pengelolaan BMD , sehingga tidak ada lagi data yang tercatat ganda , data yang tercatat diKIB tetapi fisikya tidak ada di OPD .
2. Tujuan Inovasi Daerah Untuk menertibkan Aset atau Barang Milik Daerah di OPD - OPD Lingkungan Kabupaten Bengkulu Selatan .
3. Manfaat yang Diperoleh Adanya bukti secara tertulis terhadap pengelolaan barang milik daerah sehingga dapat dipertanggung jawabkan keberadaanya . Lebih optimal dalam pengelolaan barang milik daerah . Akurasi data SIMDA BMD .
4. Hasil Inovasi Mendapatkan kesamaan data yang ada di SIMDA BMD dengan data yang ada di OPD OPD Lingkungan Kabupaten Bengkulu Selatan .

- ✓ Tim Penelusuran Aset



- ✓ Cek Fisik Data BMD



- ✓ Cek Fisik Dilapangan



3.5 Aktualisasi dan Implementasi Core Values BerAKHLAK

Aktualisasi dan implementasi core values ASN BerAKHLAK dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan pelaksanaan tugas.

Core values ASN BerAKHLAK adalah Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2024 telah melaksanakan Implementasi Core Values BerAKHLAK seperti penetapan tim Budaya Kerja dan membuat prasarana Core Values BerAKHLAK Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Berikut Budaya Kerja dan prasarana Core Values BerAKHLAK Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Gambar 3.5.1 (*Budaya Kerja Badan Keuangan Daerah*)



Gambar 3.5.2 (Core Values BerAKHLAK BKD)



Contoh penerapan core values ASN BerAKHLAK di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan :

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, dan disiplin
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
- Bersedia bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
- Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, dan Negara

Selain dari itu Badan Keuangan Daerah juga telah melakukan pembacaan Core Values BerAKHLAK,

Gambar 3.5.3 (Pembacaan Core Values BerAKHLAK BKD)



BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan Daerah (BKD) Bengkulu Selatan Tahun 2024 merupakan laporan kinerja tahun terakhir dari periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 - 2026. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang dimiliki BKD Bengkulu Selatan Tahun 2024. Berdasarkan hasil analisis dari berbagai pengukuran yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja beberapa sasaran strategis yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2024 belum dapat di hitung. Sehingga dapat dikatakan bahwa Bengkulu Selatan Tahun 2024 belum dapat dipastikan telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut karena adanya upaya-upaya perbaikan yang terus dilakukan dan dukungan serta komitmen dari semua pihak untuk meningkatkan kinerja pada tahun 2024..

4.2 . REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian kinerja pada tahun 2024, terdapat beberapa permasalahan yang ditemui dan memerlukan upaya - upaya perbaikan untuk mengatasinya pada tahun mendatang diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penganggaran belanja daerah pada APBD Bengkulu Selatan ;
2. Menggunakan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam pemberian reward dan punishment kepada pegawai;
3. Mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah pada semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Bengkulu Selatan Tahun 2024;

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BADAN KEUANGAN DAERAH

JL. RAYA PADANG PANJANG NO. 1, TELP. (0739) 23148 FAX (0739)23148 MANNA www.BPKAD.BengkulKab.go.id

Manna, 08 Januari 2025

Nomor : 900/20/BKD/2025
Sifat : Penting
lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada,
Yth. Seluruh Kabid BKD
Kab. Bengkulu
Selatan

Di -
Tempat

Dalam Rangka Persiapan Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dengan ini, kami mengundang Anggota Tim Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 09 Januari 2025
Jam : 09.00 Wib s/d selesai
Tempat : Kantor BKD Kabupaten Bengkulu Selatan
Acara : Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BAB I dan II.

Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon kepada saudara/i untuk datang tepat waktu.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



Nuzmanto. M. Adil, ST
NIP. 197511062003121006

Tembusan :

1. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BADAN KEUANGAN DAERAH

JL. RAYA PADANG PANJANG NO. 1. TELP. (0739) 23148 FAX (0739) 23148 MANNA www.BPKAD.Bengkab.go.id

Manna, 15 Januari 2025

Nomor : 900/26/BKD/2025
Sifat : Penting
lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada,
Yth. Seluruh Kabid BKD
Kab. Bengkulu
Selatan

Di -
Tempat

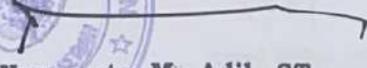
Dalam Rangka Persiapan Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dengan ini, kami mengundang Anggota Tim Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Januari 2025
Jam : 09.00 Wib s/d selesai
Tempat : Kantor BKD Kabupaten Bengkulu Selatan
Acara : Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BAB III dan IV.

Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon kepada saudara/i untuk datang *tepat waktu*.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN


Nuzmanto. M. Adil, ST
NIP. 197511062003121006

Tembusan :

1. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BADAN KEUANGAN DAERAH

JL.RAYA PADANG PANJANG NO. 1. TELP. (0739) 23148 FAX (0739)23148 MANNA www.BPKAD.BengkulKab.go.id

Manna, 23 Januari 2025

Nomor : 900/ 25 /BKD/2025
Sifat : Penting
lampiran : -
Perihal : Permintaan Data

Kepada,
Yth. Seluruh Kabid
Perbendaharaan
Kab.Bengkulu
Selatan

Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubung dengan adanya penyusunan Laporan Kinerja (Lkj) Tahun 2024 dengan ini kami mohon agar bapak dapat menyampaikan data yang kami inginkan demi kelancaran dalam penyusunan Lkj. Mengingat pentingnya data tersebut agar kiranya bapak dapat menyampaikan data yang kami pinta ke bagian perencanaan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim

Awal Effie,SP

NIP. 197610102010011017



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BADAN KEUANGAN DAERAH

JL. RAYA PADANG PANJANG NO. 1. TELP. (0739) 23148 FAX (0739)23148 MANNA www.BPKAD.BengkulKab.go.id

2025

Manna, 23 Januari

Nomor : 900/ *2s* /BKD/2025
Sifat : Penting
lampiran : -
Perihal : Permintaan Data

Kepada,
Yth. Kabid Akuntansi BKD
Kab.Bengkulu
Selatan

Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubung dengan adanya penyusunan Laporan Kinerja (Lkj) Tahun 2024 dengan ini kami mohon agar bapak dapat menyampaikan data yang kami inginkan demi kelancaran dalam penyusunan Lkj. Mengingat pentingnya data tersebut agar kiranya bapak dapat menyampaikan data yang kami pinta ke bagian perencanaan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim

Awal Effie,SP

NIP. 197610102010011017



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BADAN KEUANGAN DAERAH

JL.RAYA PADANG PANJANG NO. 1. TELP. (0739) 23148 FAX (0739)23148 MANNA www.BPKAD.Bengselkab.go.id

2025

Manna, 23 Januari

Nomor : 900/ 25 /BKD/2025
Sifat : Penting
lampiran : -
Perihal : Permintaan Data

Kepada,
Yth. Kabid Aset BKD
Kab.Bengkulu
Selatan

Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubung dengan adanya penyusunan Laporan Kinerja (Lkj) Tahun 2024 dengan ini kami mohon agar bapak dapat menyampaikan data yang kami inginkan demi kelancaran dalam penyusunan Lkj. Mengingat pentingnya data tersebut agar kiranya bapak dapat menyampaikan data yang kami pinta ke bagian perencanaan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim

Awal Effie,SP

NIP. 197610102010011017



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BADAN KEUANGAN DAERAH

JL. RAYA PADANG PANJANG NO. 1. TELP. (0739) 23148 FAX (0739) 23148 MANNA www.BPKAD.BengkulKab.go.id

Laporan Pelaksanaan
Pembahasan LKJ BAB I dan II

Hari/Tanggal : Kamis, 09 Januari 2025

Tempat : Ruang Kepala BKD Bengkulu Selatan

Waktu : 09.00 WIB

Peserta : Kepala Badan, Sekretaris, Seluruh Kabid dan Kasubag BKD BS

Pemateri : Kasubag Perencanaan

Materi Sosialisasi

1. Pembuatan dan Pembahasan Bab I LKJ 2024 BKD
2. Pembuatan dan Pembahasan Bab II LKJ 2024 BKD

Hasil Sosialisasi

1. Pembuatan Latar Belakang Pendahuluan , Tujuan Penyusunan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.
2. Pembuatan Perencanaan Strategis yang berisi tentang Visi Misi Tujuan dan Sasaran Strategi Arah Kebijakan.
3. Penyusunan Rencana Anggaran yang berisi Target Belanja dan Pengalokasian Anggaran Persasaran Strategis..

Mengetahui
Kepala Badan Keuangan Daerah



Nuzmanto M.Adil,ST
Nip. 197511062003121006

Pelaksana
Kasubag Perencanaan

Desmi Haryani, A.Md
Nip. 197912212008012006

PEMBAHASAN LKJ BAB I dan II BKD





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BADAN KEUANGAN DAERAH

JL. RAYA PADANG PANJANG NO. 1. TELP. (0739) 23148 FAX (0739) 23148 MANNA www.BPKAD.Bengkab.go.id

Pembahasan BAB III dan IV Penyusunan LKJ BKD

Hari/Tanggal : Selasa, 15 Januari 2025

Tempat : Ruang Kepala BKD Bengkulu Selatan

Waktu : 09.00 WIB

Peserta : Kepala Badan Keuangan Daerah, Sekretaris, Seluruh Kabid dan Kasubag BKD BS

Poko Pembahasan : Pembahasan Bab III Lkj 2024 Badan Keuangan Daerah

Pembahasan Bab IV Lkj 2024 Badan Keuangan Daerah

Hasil Sosialisasi :

1. Membahas Capaian Indikator, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.
2. Mengumpulkan Inovasi di Bidang-Bidang.
3. Dikumpul Paling Lambat Tanggal 20 Januari.
4. Membahas Bab IV Lkj Badan Keuangan Daerah Kab Bengkulu Selatan

Mengetahui
Kepala Badan Keuangan Daerah



Nuzmanto M.Adil,ST
Nip. 197511062003121006

Pelaksana
Kasubag Perencanaan



Desmi Haryani, A.Md
Nip. 197912212008012006

DOKUMENTASI RAPAT INTERNAL
PEMBAHASAN LKJ BAB I dan II BKD





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

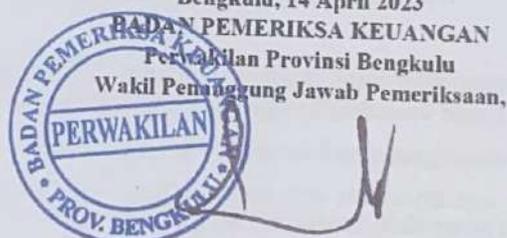
Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 17.B/LHP/XVIII.BKL/04/2023 tanggal 17 April 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bengkulu, 14 April 2023



Ronald Sinaga, SE, MIM, Ak., CA, CSFA
Akuntan, Register Negara Nomor D16211



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU**

Jl. Adam Malik KM. 08 Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu 38225, Layanan Call Center 081 181 123 123

Bengkulu, 20 Mei 2024

Nomor : 257/S/XVIII.BKL/05/2024
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Bengkulu Selatan TA 2023

**Kepada Yth.
Bupati Bengkulu Selatan
di Manna**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2023, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2023 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian dengan Penekanan Suatu Hal**.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023, antara lain:

- a. Pembayaran Gaji ASN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat Imbal Jasa;
- b. Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada RSUD Hasanuddin Damrah Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat Kelebihan Pembayaran;
- c. Kelebihan Pembayaran atas Empat Paket Pekerjaan Belanja Modal, Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas PUPR; dan
- d. Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Hasanuddin Damrah Manna Tidak Tertib dan Terdapat Kas yang Tidak Dalam Penguasaan Bendahara.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Bengkulu Selatan antara lain agar:

- a. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan supaya menyetorkan hasil imbal jasa ke Kas Daerah;

- b. Memproses kelebihan pembayaran atas realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
- c. Memproses kelebihan pembayaran Pekerjaan Belanja Modal, Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas PUPR dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan
- d. Memberikan sanksi berupa hukuman disiplin kepada Direktur, Kabag Tata Usaha, Kasubag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran pada RSUD HD periode TA 2023.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu LHP Nomor 23.A/LHP/XVIII.BKL/05/2024 dan Nomor 23.B/LHP/XVIII.BKL/05/2024, masing-masing tertanggal 20 Mei 2024.

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Bupati menindaklanjuti rekomendasi BPK yang dimuat dalam LHP dan menyampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Bengkulu Selatan, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Muhamad *[Signature]*, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA., CFra.
NIP 197212271997031003

Tembusan:
Inspektur Kabupaten Bengkulu Selatan.